

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. 2006, Sistem perencanaan dan penganggaran pemerintahan daerah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat
- Creswell, J.W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Edisi Keempat. California: SAGE Publications.
- Fitry, R. 2010. “Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan Kota Lubuklinggau Tahun 2010”. Tesis: Universitas Indonesia.
- Halim, A. dan Icut R.B. 2011. *Pengelolaan Keuangan Negara-Daerah: Hukum, Kerugian Negara, dan Badan Pemeriksa Keuangan*. Yogyakarta. UPP STIM YKPPN.
- Haryanto. 2008. *Perencanaan dan Penganggaran Daerah; Pendekatan Kinerja. e-book*.
- Handoko, T.H. 1995. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Kementerian Dalam Negeri. 2010. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kabupaten Gunungkidul. 2012. *Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah*. Wonosari: Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
- Kabupaten Gunungkidul. 2012. *Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perhitungan Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan dan Penyusunan Program Pembangunan Prioritas*. Wonosari: Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Muluk, K. 2007. *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintah Daerah*, Malang: FIA-UNIBRAW-Banyumedia Publishing.
- Munandar, M. 2001. *Budgeting. Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja*. Edisi 1. Cetakan 14. BPFE: Yogyakarta.
- Mustopadidjaja, A.R. “*Bappenas Dalam Sejarah Perencanaan Pembangunan Indonesia 1945-2025*”, LP3ES, Jakarta, 2012.
- Nordiawan, D. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Cetakan Kelima. Jakarta: Salemba Empat.

- Nugrohowati. 2015. "Evaluasi konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah pada Pemda DIY". Tesis: Universitas Gadjah Mada.
- Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta: Republik Indonesia
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Republik Indonesia
- Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Ritonga, I.T. 2009. *Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Sofyani, H., dan R. Akbar. 2015. Hubungan Karakteristik Pegawai Pemerintah Daerah dan Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja: Perspektif Isomorfisma Institusional. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia (JAAI)*, Vol.19, No. 2.
- Sugiarto, A. dan D. Mutiarin. 2016. "Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Anggaran Daerah (Studi Kasus Pada Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Bidang Fisik dan Prasarana Tahun Anggaran 2013-2015 di Kabupaten Gunungkidul)". Tesis: Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Terry, G.R. & Richard D.I., Inc. 1960 *Principles of Management*, Homewood Illinois,
- Yin, R.K. 2014. *Case Study Research: Design and Methods*. Thousand Oaks, California: SAGE Publications.